

Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi

Gilang Rizkiansah, Fachmy Sugih Pradifita*

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 28/03/2024

Revised : 07/07/2024

Published : 14/07/2024



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 41 - 50

Terbitan : Juli 2024

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) biasanya berjualan di tempat-tempat umum atau di tempat keramaian seperti kawasan Pendidikan ataupun di Kawasan pusat pemerintahan. Penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi persoalan yang krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia yang kerap melakukan upaya untuk menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima. Arahan penataan Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Kota Sukabumi yang Bersih, Indah, Tertib, dan Aman dengan Sarana Prasarana yang memadai. pedagang kaki lima sendiri yang merupakan tempat usaha informal akibat pekerjaan formal yang terbatas, maka pedagang kaki lima yang terdapat di perkotaan harus di perhatikan agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian formal yang ada dan sektor lainnya, karena terdapat kesemarautan PKL dengan aktivitas lainnya menjadikan hal ini salah satu titik konflik yang ada pada penelitian di wilayah perencanaan. Arahan penataan ini memiliki beberapa konsep dari hasil analisis yang telah disusun di mana terdapat konsep arahan waktu untuk pedagang kaki lima.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima; Penataan; Kawasan.

ABSTRACT

This street vendors (PKL) typically operate in public spaces or crowded areas such as educational zones or government centers. The spatial arrangement of street vendors is a crucial issue faced by developing countries, including Indonesia, which often makes efforts to organize and regulate street vendors. The guidance for organizing street vendors aims to realize a clean, beautiful, orderly, and safe Sukabumi city with adequate infrastructure. Street vendors, operating as informal businesses due to limited formal employment opportunities, require attention in urban areas to avoid disrupting formal economic activities and other sectors. The coexistence of street vendors with other activities becomes a point of conflict in planning research. The organizational guidance incorporates several concepts derived from the analysis, including a time-based direction for street vendors.

Keywords : Street Vendors; Management; Area.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Kota merupakan tempat pusatnya kegiatan, pelayanan dan pemerintahan yang menjadikan sebuah daya tarik bagi penduduk untuk melakukan perpindahan menuju kota yang disebut sebagai urbanisasi [1]. Kota yang menjadi tujuan penduduk untuk mengadu keberuntungan bagi para penduduk, yang menjadikan kota memberikan fasilitas dalam menunjang kegiatan-kegiatan bagi penduduk secara merata, baik dari segi keamanan, kenyamanan dan tingkat kebutuhan pekerjaan. Di mana hal tersebut sesuai dengan salah satu konsep *inclusive city*, Kota inklusi (*inclusive city*) adalah kota di mana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi [2].

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota [3]. Membangun kota inklusif bagi pedagang kaki lima adalah tujuan yang penting dalam upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, adil, dan mendukung ekonomi lokal. Sektor ekonomi sendiri yang sering sekali menjadi hal utama dalam pengembangan di kota-kota besar, dikuatkan dengan fenomena masyarakat mengadu nasib ke kota yang diharapkan untuk mendapatkan tingkat ekonomi yang lebih baik dengan mencari pekerjaan di perkotaan.

Fenomena sektor informal yang muncul pada kegiatan ekonomi ini sangat umum terjadi terjadi di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di negara Indonesia [4]. Sektor informal dan kegiatan ekonomi ini menjadi salah satu cara alternatif dalam menyambung hidup bagi masyarakat/penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Sektor informal sendiri merujuk kepada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengetahuan (*non-wage employment*) [5]. Kelompok informal cenderung menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas [6]. Perkembangan sektor informal di perkotaan menyebabkan timbulnya daerah-daerah kumuh dan memperburuk tampilan kota. Penataan kota belum mampu menyediakan tempat yang layak bagi sektor informal yang dianggap tidak legal [7].

Wilayah Kota Sukabumi memiliki titik-titik keramaian yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, salah satunya adalah Kawasan Jl. H. Djuanda, Jl. Dewi Sartika, Jl. Syamsudin, Jl. R.E. Martadinata, Jl. Belakang Rumah Sakit, dan Jl. Surya Kencana. Kawasan ini merupakan pusat pemerintahan Kota Sukabumi. Di kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi, terdapat banyak pedagang kaki lima karena meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi, terutama yang awalnya berada di wilayah Jl. H. Djuanda, telah berjualan selama sekitar 20 tahun dan menjadi tujuan kuliner yang dikenal dengan sebutan jajanan "Dago Sukabumi" oleh warga Kota Sukabumi dan sekitarnya. Kegiatan PKL yang tidak tertata menyebabkan terganggunya sendi-sendi kegiatan kota, sehingga menurunkan kualitas lingkungan kota [8]. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul, seperti kemacetan pada waktu-waktu tertentu seperti akhir pekan atau hari libur, parkir liar yang tersebar di wilayah tersebut, serta masalah kebersihan akibat sampah yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima [9]. Pada tahun 2022, para pedagang kaki lima ini dipindahkan ke Jl. Dewi Sartika, yang juga merupakan wilayah dalam kawasan pusat pemerintahan. Keputusan pemindahan ini langsung berasal dari instruksi walikota Kota Sukabumi, sebagai bagian dari program pembangunan pedestrian di Jl. H. Djuanda, Kota Sukabumi.

Pemindahan pedagang kaki lima dari Jl. H. Djuanda menuju Jl. Dewi Sartika tersebut tidak menjadi solusi dalam menangani permasalahan penataan pedagang kaki lima. Yang dirasakan oleh masyarakat sekitar hanyalah perpindahan masalah ke wilayah lain, karena tidak ada tindak lanjut dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah Kota Sukabumi. Pedagang kaki lima semakin terfragmentasi dan menyebar di titik-titik keramaian, tidak lagi berkumpul dalam satu titik seperti sebelumnya di Jl. H. Djuanda. Ketidakteraturan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan pemerintahan Kota Sukabumi mengindikasikan perlunya arahan penataan bagi pedagang kaki lima guna mewujudkan Kota Sukabumi yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan fasilitas yang memadai. Penataan tersebut juga diharapkan tidak mengganggu usaha kecil yang telah lama dijalankan oleh sebagian masyarakat di kawasan Kota Sukabumi. Dalam hal tersebut penelitian ini memiliki identifikasi seperti : (1) Mengidentifikasi karakteristik pedagang kaki lima di kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi; (2) Mengidentifikasi Potensi dan Permasalahan PKL di kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi; (3) Merumuskan arahan penataan PKL di kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi.

B. Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan analisis yang berbeda, yakni pendekatan kualitatif dengan analisis pohon masalah dan analisis spasial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif dengan model penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditunjukkan untuk kepentingan pendalaman.

Teknik Analisis pohon adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat. Dan Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang juga menggambarkan kondisi data-data dengan spasial, yang di mana deskriptif diambil dari hasil-hasil data dari peta-peta lapangan seperti data dari sebaran pedagang kaki lima yang berada di Kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Wilayah dan Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima

Kondisi demografis sendiri meliputi dari jumlah penduduk yang ada pada kedua kelurahan wilayah studi. Penduduk pada wilayah studi merupakan dari dua kelurahan yakni kelurahan cikole dan gunung parang Adapun uraian dari jumlah penduduk sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah penduduk wilayah

No	Kelurahan	Penduduk (jiwa)		
		2017	2018	2019
1	Cikole	5.917	5.930	4.035
2	Gunung Parang	4.047	4.055	5.994
	Total	9.964	9.985	10.029

Sumber: Profil Kec.Cikole, 2022

Sarana dan prasarana yang berada di Kelurahan Cikole dan Gunung parang terdapat perkantoran pemerintahan baik negeri ataupun swasta dengan total 10unit, masjid dengan jumlah 45 unit, rumah sakit 2 unit. Sarana pendidikan Sekolah Dasar ada 10unit negeri/swasta. Keberadaan SMP ada 8 unit negeri/swasta. Sekolah menengah atas negeri/swasta seluruhnya ada 4 unit dan untuk Perguruan tinggi Swasta terdapat 1 unit.

Secara umum wilayah penelitian merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Dalam kawasan penelitian terdapat sarana umum atau publik yang cukup membuat kawasan tersebut menjadi ramai. Keberadaan Sarana Pendidikan, dan sarana pemerintahan/Kantor menjadi daya tarik sendiri di kawasan ini. Dari tingginya aktivitas yang timbul dikawasan penelitian ini menimbulkan berbagai permasalahan kota diantaranya kemacetan dan penurunan estetika kota yang disebabkan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan penelitian. PKL dalam kawasan penelitian ini umumnya tersebar daerah kantor pemerintahan yakni balai kota, dan sekitaran sekolah dasar negeri Dewi Sartika. di mana dalam melakukan aktivitasnya para PKL umumnya menempati badan jalan dan trotoar dengan sarana yang digunakan adalah beragam, mulai dari bangunan permanen, gerobak, maupun gelaran atau alas dan motor.

Karakteristik Fisik Pedagang kaki Lima

Karakteristik Fisik Pedagang Kaki Lima terdiri dari tiga yaitu yang pertama Jenis Pendasaran , yang kedua Jenis Dimensi Pendasaran dan komoditas barang dan yang terakhir Jenis Lokasi PK. Jenis Pendasaran yaitu Karakteristik jenis pendasaran pada pedagang kaki lima di setiap eksisting pada Kawasan penelitian dapat dilihat dan dijelaskan pada diagram berikut.



Gambar 1. Diagram jenis pendasaran

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada umumnya sendiri Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi sangat didominasi oleh jenis pendasaran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan Gerobak dengan persentasi sebesar 84% kemudian sisanya dengan persentasi yang kecil dari 7% oleh Motor, 5% oleh Tenda dan 4% oleh jenis pendasaran tanggungan.

Tabel 2. Kondisi Jenis Pendasaran

No	Jenis Pendasaran	Dokumentasi/Kondisi eksisting
1	Gerobak	
2	Motor	
3	Tenda/Ruko	
4	Tanggungan	

Sumber: Hasil Observasi, 2023

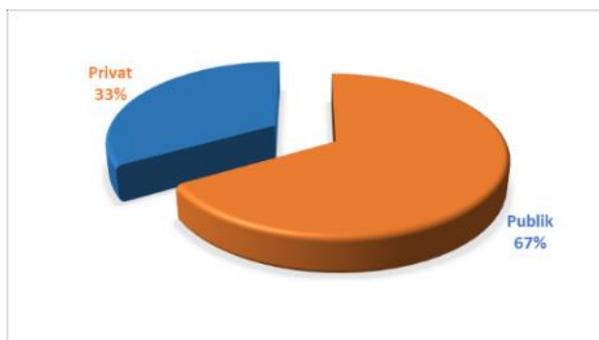
Jenis Dimensi Pendasaran dan komoditas barang, Sarana pedagang kaki lima (PKL) dapat memiliki beragam dimensi tergantung pada jenis dagangan yang dijual dan lokasi tempat berjualan. Dimensi dalam ukuran pendasaran pedagang kaki lima dapat berbeda-beda di setiap daerah dan kota. Pemerintah setempat biasanya memiliki peraturan terkait dengan ukuran dan lokasi pedagang kaki lima untuk memastikan tidak mengganggu lalu lintas, lingkungan, serta keamanan masyarakat. Maka pada penelitian ini dimensi dari jenis-jenis pendasaran diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Diantaranya dengan ukuran 170x70 cm, 150x200 cm dan 80x40 cm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 2. Diagram persentase Dimensi Pendasaran dan komoditas makanan

Dimensi Pendasaran yang terdapat di Kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi dari diagram di atas didominasi oleh ukuran 170x70 cm dengan besaran 84%. Ukuran dimensi yang terdapat pada wilayah perencanaan sebagian besar sudah mengikuti aturan daerah yang ada. Mayoritas yang telah mengikuti aturan sendiri dimensi pendasaran gerobak. Dan Komoditas jenis penjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi ini didominasi oleh dua jenis komoditas yakni oleh jenis komoditas makanan dengan persentase 60% dan untuk urutan kedua pada jenis komoditas minuman dengan persentase sebesar 35%.

Jenis Lokasi PKL, Jenis lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi pada penelitian ini di bagi menjadi dua jenis yakni jenis lokasi Publik yang berarti berjualan atau melakukan aktivitas PKL di kawasan publik/umum, dan jenis lokasi privat di mana lokasi ini yang memiliki hak swasta/pribadi seperti halaman sekolah, kantor, dan minimarket. Dua jenis lokasi PKL ini dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 3. Diagram persentase jenis Lokasi

Pada data tersebut nilai tertinggi pada jenis lokasi PKL publik yang memiliki nilai sebesar 67%, dan untuk nilai persentase 33% di isi oleh jenis lokasi privat pada wilayah Studi. Maka dari data tersebut terlihat bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi ini berjualan pada lokasi Publik seperti trotoar, Jalanan dan taman-taman sekitar lokasi wilayah studi. Untuk mengetahui karakteristik dari beberapa jenis lokasi pkL berdasarakan eksisting dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kondisi Lokasi PKL

No	Karakteristik Jenis Lokasi	Keterangan
1	<p>Jl. R.E Martadhinata</p>	Memiliki lebar pedestrian 3.5 meter, lebar ruas jalan 11.5 meter namun terpotong adanya pkL sebesar 1.5 meter.

Tabel 3. Kondisi Lokasi PKL (Lanjutan)

No	Karakteristik Jenis Lokasi	Keterangan
2	<p>Jl. Dewi Sartika</p>	<p>Lebar total 10 meter , yang terbagi 3.5 meter untuk pendestrian, ruas jalan 7.5 meter, dan terpakai PKL masing-masing 1.5 meter.</p>
3	<p>Jl. Belakang Rumah sakit</p>	<p>Lebar total 10 meter, pendestrian yang terpakai pkl sebesar 2meter dan 4 meter.</p>
4	<p>Jl. Surya Kencana</p>	<p>Ruas jalan utama kota sukabumi dengan total 17 meter, untuk pedestrian sendiri terdapat 3.5meter dan terdapat PKL menggunakan ruas pedestrian 1.5 meter.</p>

Sumber: Hasil Observasi, 2023

Karakteristik Non-Fisik Pedagang Kaki Lima

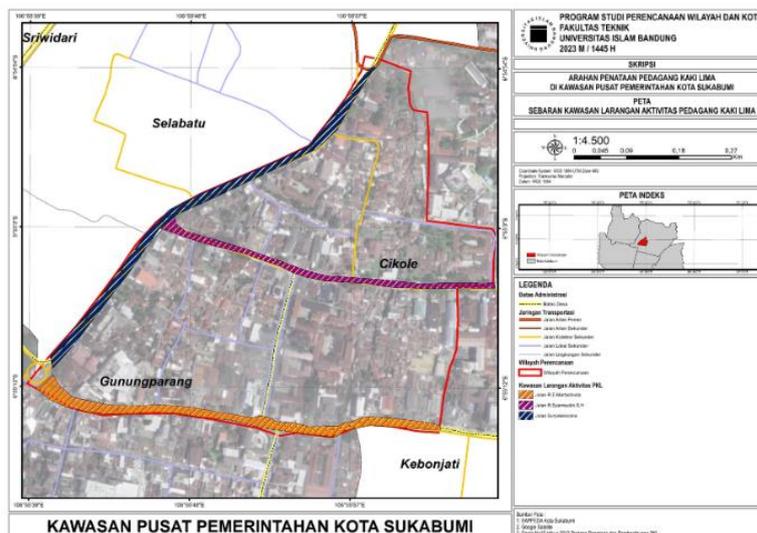
Karakter non-fisik pedagang kaki lima terdiri dari tiga yaitu yang pertama Waktu Kegiatan PKL, Jenis Permanensi dan Zona Kawasan, yang kedua Tujuan Penataan (Visi dan Ide) dan yang terakhir Konsep Arahan Penataan. Waktu Kegiatan PKL, Jenis Permanensi dan Zona Kawasan yaitu waktu kegiatan Pedagang Kaki Lima di kawasan Penelitian ini memiliki jam oprasional diawal buka pagi hingga tutup malam hari dan Sifat kegiatan usaha PKL umumnya dibedakan menjadi permanen (menetap), dan non permanen (berpindah-pindah). Karakteristik pada waktu dan jenis permanensi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 3. Diagram Jam oprasional dan Sifat Usaha

Zona kawasan pada kawasan penelitian ini mengacu kepada perda no.10 tahun 2013 tentang penataan pedagang kaki lima dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kota Sukabumi. Di mana pada perda tersebut

menyebutkan Kawasan yang dilarang untuk melakukan aktivitas pedagang kaki lima. melihat data bahwa terdapat kawasan yang dilarang melakukan kegiatan/aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang di mana kegiatan apapun itu, diantaranya terdapat di kawasan jalan-jalan utama di kota sukabumi yakni jalan Suryakencana, Jalan R. Syamsudin. S.H. dan jalan R.E. Martadinata. Ini tertuang pada perda no 10 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kota sukabumi pada pasal 21 ayat ke 1.



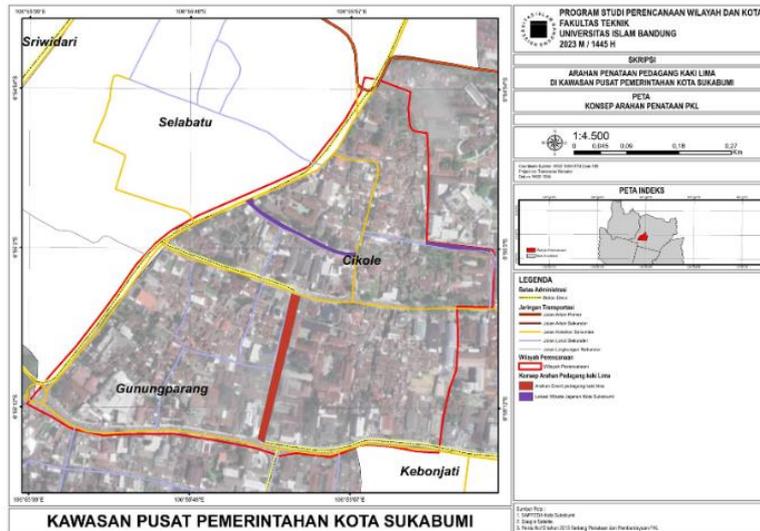
Gambar 4. Peta Kawasan Larangan Aktivitas PKL

Tujuan Penataan (Visi dan Ide), Tujuan penataan pada wilayah perencanaan ini terlihat pada analisis yang telah dilakukan baik analisis deskriptif ataupun analisis pohon masalah, dan meruju pada visi misi Kota Sukabumi di mana untuk menciptakan Kota Sukabumi yang ‘Terwujudnya kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera’. Di mana sesuai dengan visi misi Kota Sukabumi tersebut maka tujua dari penataan pedagang kaki lima dikawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi ini menjadikan pedagang kaki lima yang nyaman untuk pengguna jalan untuk dikawasan publik dan menjadi Kawasan wisata kuliner jajanan Kota Sukabumi.

Wisata kuliner jajanan Kota Sukabumi yang nyaman merupaka tidak mengganggu aktivitas lainnya. Wisata Kuliner jajanan Kota Sukabumi yang nyaman untuk pengguna jalan ini bertujuan untuk saling menguntungkannya bagi pedagang kaki lima dan untuk pengguna jalan lainnya. Wisata kuliner jajanan Kota Sukabumi untuk menjunjang tujuan yang nyaman, maka di jelaskan pada konsep-konsep dari arahan penataan pada pedagang kaki lima yang berada di Kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi.

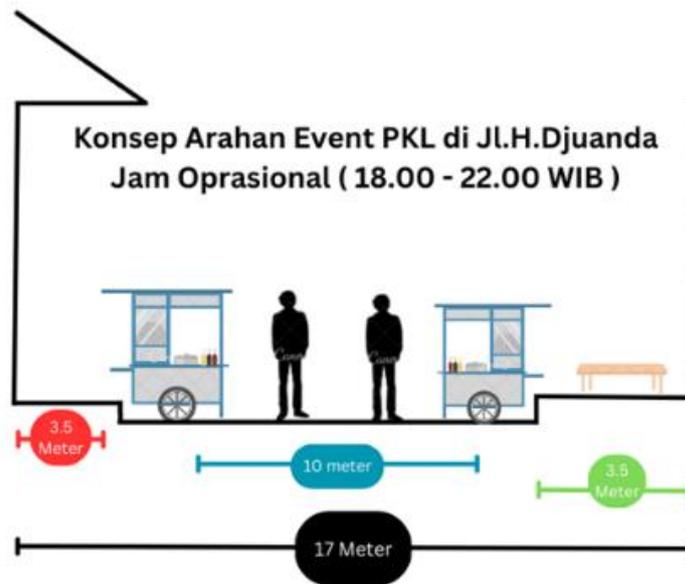
Konsep Arahan Penataan, Arahan penataan Pedagang kaki lima di Kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi ini memiliki beberapa konsep dilihat dari tujuan penataan dan analisis yang telah di lakukan di sub bab sebelumnya, maka konsep penataan pada wilayah studi ini memiliki konsep arahan lokasi pedagang kaki lima. Konsep arahan lokasi pedagang kaki lima pada peneliiian ini terbagi menjadi dua karakter, antaranya karakter membuat lokasi wisata kuline jajanan Kota Sukabumi, pada hal ini arahan yang pertama terdapat pada dua area jalan yakni Jl. Dewi Sartika dan Jl. Belakang rumah sakit. karakter yang pertama ini memiliki tujuan untuk memfokuskan lokasi untuk pedagang kaki lima agar tidak tersebar tidak teratur, dan pemerintah yang menjadi naungan untuk pedagang kaki lima karna menggunkan lokasi publik, ini memiliki bestpractice yang berada di Yogyakarta yaitu konsep teras malioboro 1 dan teras malioboro 2.

Karakteristik konsep yang kedua yakni konsep arahan event pedagang kaki lima di mana berada di Jl.H.Djuanda Kota Sukabumi, yang dimaksud pada karakter kedua ini merupakan arahan untuk pedagang kaki lima berjualan diwilayah tersebut, namun tidak untuk berjualan setiap waktu namun seperti yang ada di korea selatan yakni myeongdong street. Di mana pedagang kaki lima buka pada saat malam hari dan pada siang hari jalan tersebut di gunakan untuk kendaraan melintas. Oleh hal tersebut konsep arahan event ini dilakukan di jam tertentu bukan untuk beraktivitas pkl sepanjang hari/waktu. Untuk lebih jelas dalam penepatan konsep arahan penataan ini dapat dilihat pada gamabar berikut.



Gambar 5. Arahan Penataan PKL

Konsep Arahan Waktu pada Kegiatan pedagang kaki lima termasuk kedalam konsep arahan lokasi pedagang kaki lima, bertujuan untuk memberikan efisiensi waktu dikawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi terutama wilayah yang di jadikan titik pedagang kaki lima. Hal tersebut agar tidak terjadinya kepadatan di satu waktu karna waktu pedagang kaki lima dengan waktu kegiatan lainnya dilakukan serentak, yang di ketahui pusat pemerintahan sendiri merupakan Kawasan yang dipastikan kegiatan yang sibuk dan selalu ada. Maka konsep arahan waktu seperti jam oprasional untuk pedagang kaki lima dan jam oprasional untuk penggunaan jalan kendaraan. Di mana wilayah pedagang kaki lima ini sendiri merupakan wilayah publik masih terdapat beberapa aktivitas lain selain kegiatan pedagang kaki lima, dengan hal tersebut harus adanya konsep arahan waktu, di mana konsep ini dirancang sebagai pembagian waktu untuk publik/lainnya dan waktu kegiatan pedagang kaki lima. Untuk lebih jelasnya dalam konsep arahan Waktu pedagang kaki lima ini dapat dilihat pada Gambar Berikut.



Gambar 6. Rencana Konsep Waktu PKL

Rencana konsep waktu pedagang kaki lima ini merujuk kegiatan pedagang kaki lima dilakukan diluar waktu jam kerja. Maka dirancang konsep waktu pedagang kaki lima di pusat pemerintah Kota Sukabumi ini dimulai pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk karakter konsep arahan event PKL dan untuk lokasi wisata kuliner pedagang kaki lima memiliki jam oprasional yang lebih panjang, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Berikut.



Gambar 7. Konsep Arahan Penataan PKL

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Pedagang kaki lima dikawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi sendiri memiliki jumlah sekitar 75 pedagang kaki lima, yang di mana dari pendasaran sendiri sebanyak 84% merupakan gerobak, 7% merupakan motor, 5% merupakan tenda/ruko dan 4% merupakan jenis pendasaran tanggungan. Untuk komoditas sendiri terbagi menjadi tiga berjualan Makanan saja, minuman dan campuran yang di mana makanan dan minuman. 60% merupakan besaran dari komoditas makanan saja, 35% besaran dari minuman dan sisanya 5% merupakan Campuran.

Pedagang kaki lima dari aspek kegiatan terdapat waktu dan sifat usaha yang merupakan klarifikasi permanen/non-permanen. Dari 75 unit pedagang kaki lima sebesar 77% merupakan sifat usaha yang permanen dan 23% non-permanen. Pedagang kaki lima di kawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi sendiri jam oprasional di mayoritas pukul 09.00 WIB s/d 22.00 WIB sebesar 95% dan sisanya 5% merupakan jam oprasional pukul 07.00 WIB s/d 00.00 WIB.

Berdasarkan dari analisis spasial metode Deskriptif sendiri mayoritas pedagang kaki lima berada diluar kawasan larangan aktivitas PKL, yang di mana hal tersebut berpacu pada perda no 10 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kota sukabumi, pedagang kaki lima sendiri masih berada di jenis lokasi publik yang merupakan bukan peruntukan khusus untuk pedagang kaki lima.

Konsep arahan penataan pedagang kaki lima pada penelitian memiliki dua karakter diantaranya konsep lokasi pedagang kaki lima yang disebut sebagai wisata kuliner jajanan Kota Sukabumi, yang di pusatkan menajadi dua titik yakni Jl. Dewi sartika dan Jl. Belakang rumah sakit. Untuk karakter konsep kedua merupakan konsep lokasi event pedagang kaki lima dengan pemberian waktu khusus aktivitas PKL pada mala hari, bertujuan untuk memberikan efisiensi waktu dikawasan pusat pemerintahan Kota Sukabumi terutama wilayah yang di jadikan titik perdagang kaki lima.

Daftar Pustaka

- [1] F. Firmansyah, “Penataan Kawasan PKL Berdasarkan Preferensi Pedagang Di Kawasan Pusat Kota Jember,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya , Surabaya, 2009.
- [2] A. Maftuhin, “Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator,” *TATALOKA*, vol. 19, no. 2, p. 93, May 2017, doi: 10.14710/tataloka.19.2.93-103.
- [3] M. F. Pramono, “Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan di Surakarta,” *Wahana Akademika*, vol. 2, no. 1, 2015, doi: 10.21580/wa.v2i1.823.

- [4] K. Damayanti, “Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat,” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 16, no. 1, p. 55, Nov. 2021, doi: 10.14203/jki.v16i1.428.
- [5] S. Turner, C. Zubereca, and T.-T.-H. Phamb, “Visualizing frictional encounters: Analyzing and representing street vendor strategies in Vietnam through narrative mapping,” *Applied Geography*, vol. 131, 2021.
- [6] S. E. Wibisono, “Arahan Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima (Pkl) di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Surabaya, 2014.
- [7] I. A. Syahputra, H. Munirwan, and H. T. Putri, “Faktor Utama Pembentuk Permukiman Kumuh di Kelurahan Srengsem dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP),” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 20, no. 1, Mar. 2024, doi: 10.14710/pwk.v20i1.48122.
- [8] R. Widjajanti, “Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota,” *TEKNIK*, vol. 30, no. 3, pp. 162–170, 2012, doi: <https://doi.org/10.14710/teknik.v30i3.1892>.
- [9] Edwina Fernanda and Weishaguna, “Arahan Penataan Promenade Setu Babakan,” *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 115–128, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrpwk.v3i2.2750.
- [10] Luthfiyyah Nurjaman and Ernawati Hendrakusumah, “Identifikasi Tingkat Kenyamanan Ruang Terbuka Publik Pusat Kota Sukabumi,” *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 139–150, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrpwk.v3i2.2751.